

BAB I

1.1.Latar Belakang

Hubungan internasional, sebagai bidang studi, meliputi interaksi dan hubungan antara negara-negara, bangsa-bangsa, dan organisasi internasional. Ini melibatkan analisis hubungan diplomatik, ekonomi, budaya, dan militer yang membentuk lingkungan global yang mencakup studi hukum internasional, organisasi internasional, dan keamanan internasional, yang semuanya merupakan komponen penting dari hubungan internasional (Chalisey, 2024, p. 53). Hubungan internasional adalah bidang yang kompleks dan multifaset yang melibatkan studi tentang interaksi antara negara-negara berdaulat dan aktor lain dalam sistem internasional. Bidang ini ditandai dengan analisis berbagai bentuk kerjasama dan konflik, termasuk aliansi, persaingan, dan perang (Oishi & Sakuwa, 2020, p. 2).

Selain itu, hubungan internasional mempengaruhi pengembangan kebijakan dan strategi pertahanan. Negara-negara harus mempertimbangkan lanskap geopolitik dan tindakan negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan pertahanan mereka termasuk evaluasi ancaman potensial dan identifikasi peluang kerjasama (Chalisey, 2024, p. 58). Diplomasi pertahanan yang efektif dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian dengan memperkuat pemahaman saling dan kepercayaan di antara bangsa-bangsa. Selain itu, hubungan internasional memberikan kerangka untuk memahami peran diplomasi pertahanan dalam keamanan internasional (Danchev, 1992, p. 167).

Indonesia yang dikenal negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus sebagai negara maritim yang sarat akan berbagai ancaman, harus memiliki sebuah sistem pertahanan negara yang mampu menghalau berbagai resiko yang bisa mencederai kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme untuk bisa meningkatkan sistem pertahanan negara yang bisa dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain baik berupa pembelian senjata, pertukaran informasi dan latihan bersama. Dari segi pertahanan khususnya militer, Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah melakukan berbagai kerjasama pertahanan dengan beberapa negara sejak era kemerdekaan, reformasi hingga saat ini, baik dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat maupun negara kawasan seperti Singapura.

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2002 yang berbunyi “*Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan*”

negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Undang-undang ini menyatakan bahwa segala aspek dalam negeri dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan sistem pertahanan Indonesia, dalam hal ini TNI sebagai sumber daya manusia dan juga komponen lainnya seperti penggunaan sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Namun UU Pertahanan Negara tidak selalu mengatur ruang lingkup ancaman militer ataupun nonmiliter, melainkan juga ancaman yang juga bersifat multi aspek yang bisa berasal dari permasalahan ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya maupun masalah seperti keamanan yang terkait dengan kejahatan Internasional seperti bahaya narkoba, perselisihan perbatasan negara (dengan malaysia), imigran gelap dan lain sebagainya. Undang-undang ini mengatur tentang pertahanan negara yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keamanan seluruh negara dari segala bentuk ancaman. Dalam menerapkan segala bentuk antisipasi, segala komoditas dan sumber daya yang dimiliki negara diharap mampu untuk dikerahkan melalui penyeimbangan kekuatan militer yang terlatih dan pembelian alutsista yang memadai agar mampu menghalau ancaman yang bisa timbul dikemudian hari.

Pertahanan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara matang oleh sebuah sistem pertahanan negara melalui upaya membangun dan mengembangkan kemampuan dan pencegahan negara dan nasional serta menghadapi segala ancaman yang ada. Sistem Pertahanan Negara terhadap ancaman kedaulatan negara dikerahkan oleh TNI sebagai komponen utama yang didukung pasukan cadangan oleh bagian Komponen Cadangan (Komcad) dan komponen pendukung lainnya (Kementerian Pertahanan, 2015, p. 48). Sedangkan dalam menghadapi ancaman dari non-militer, peran lembaga pemerintahan di luar sektor pertahanan menjadi elemen kunci yang diserasikan dengan segala bentuk dan sifat ancaman yang hadir dan didukung oleh faktor-faktor lainnya yang bisa berbeda-beda. Dalam hal ini, Komando Daerah sebagai bagian dari TNI yang merupakan gelar angkatan yang memungkinkan TNI menjalankan misi pertahanan negara.

Sesuai amanat yang terkandung dalam UU No 16 tahun 2012 pasal 47 yaitu "*Dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dilakukan dengan menjalani kerjasama yang saling menguntungkan dengan saling mengutamakan Kepentingan Nasional*". Kerjasama juga bertujuan untuk mempercepat penguasaan teknologi pertahanan dan menekan biaya pengembangan teknologi.

Selanjutnya, sesuai pula dengan isi dari UU No 16 tahun 2012 pasal 48 yang berbunyi “*(1) Penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional*”. Sehingga dalam UU No 16 tahun 2012 tersebut ditekankan mengenai kerjasama yang terjadi di dalam atau luar negeri mencakup dalam transfer teknologi, penelitian, pendidikan dan pengembangan, pemasaran, rekayasa, pembiayaan, produksi, dan khususnya yang paling utama adalah program pelatihan militer.

Interaksi hubungan kerja sama antar negara menjadi semakin rumit akibat dinamisnya lingkungan strategis, dimana setiap negara berusaha melindungi kepentingannya dengan berbagai cara untuk menjalin kerja sama dengan TNI. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang dinilai sangat strategis dan peranannya yang penting di kawasan ASEAN membuat Indonesia menjadi incaran dan memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain yang ingin menjalin dan meningkatkan kerja sama (Widiyanto, 2019, p. 47). Oleh karena itu, perlu ketelitian dalam menentukan pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan. Harus ada koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara satuan kerja TNI dengan instansi / kementerian terkait. Namun pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi selama ini masih belum efektif karena belum adanya Satker TNI yang berperan mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kerja sama internasional TNI serta perwakilan TNI dalam berkomunikasi/berkoordinasi dengan instansi/kementerian terkait (Puskersin TNI, 2024) .

Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang pertahanan masih menghadapi banyak kendala seperti dokumen kerja sama yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kerja sama belum terdokumentasikan secara lengkap dan sering terjadi kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya dilakukan langsung melalui forum dinas tanpa memberitahukan kepada Satker Mabes TNI dan juga adanya pelanggaran kode etik, misalnya adanya penemuan materi pengajaran yang merendahkan sejarah dan ideologi Indonesia, yang dianggap sengaja dibuat dan dibiarkan oleh lembaga serta aparat militer di tempat tersebut (Nainggolan, 2017, p. 5). Juga terungkap adanya penyusunan materi sejarah yang mengandung ketidakakuratan terkait peran mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus, sebelumnya RPKAD/Resimen Para Komando Angkatan Darat) Sarwo Edhie Wibowo, dalam menghadapi kudeta G-30-S PKI. Materi ajar yang diungkap oleh perwira Kopassus yang mengajar di

institusi militer Australia tersebut dinilai telah menempatkan Indonesia, khususnya TNI, dalam perspektif negatif terkait situasi di Papua dan Timor-Timur. (Nainggolan, 2017, p. 5).

Selain itu, kerja sama di bidang bahan baku terkait Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam), khususnya pembelian melalui mekanisme subsidi, seringkali tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan dan juga permasalahan perbatasan (*Border Dispute*) dengan segala implikasinya masih belum diketahui secara keras dan menyeluruh. Mengevaluasi setiap kegiatan koperasi yang dilakukan dari sudut pandang kepentingan nasional untuk melihat tingkat manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama tersebut (Gunadi, 2022, p. 1300).

Diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan negara lain sudah terjalin sejak tahun 1959 yang dinamakan “Misi Yani”, tepatnya ketika setelah Operasi 17 Agustus. Indonesia kembali menghadapi rencana pelaksanaan operasi militer baru, yaitu Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang terjadi pada tahun 1961. Namun, persiapan untuk operasi tersebut telah dimulai sejak tahun 1959 hingga 1960, yang meliputi pembelian persenjataan pertama dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Eropa. (Mangkusubroto, 2023, p. 778). Dalam pembelian senjata keluar negeri, pada tahun 1959 dimulai dengan “Misi Yani” dan di tahun berikutnya diberi nama “Misi Nasution” karena pelaksanaannya dipimpin oleh Jenderal TNI Ahmad Yani dan Jenderal TNI Abdul Harris Nasution sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara lain (Mangkusubroto, 2023, p. 781). Setelah melakukan kunjungan ke beberapa negara luar negeri, Misi Yani berhasil membawa pulang persenjataan modern yang signifikan, yang mendukung kekuatan militer Indonesia dalam perjuangannya merebut Irian Barat dari Belanda pada masa itu.

Berlanjut ke era kepemimpinan presiden Suharto di masa orde baru, peran dari TNI semakin masif dengan adanya Dwifungsi ABRI dimana militer menjadi unsur yang dominan dalam pemerintahan dan mengisi beberapa jabatan strategis di dalam sistem pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya tentara sebagai anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat birokrasi non militer, pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Daerah, dan Pejabat Desa yang sering diisi oleh angkatan bersenjata yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan (Efriza, 2019, p. 167). Dengan diisinya posisi strategis di dalam sistem pemerintahan Indonesia, kebijakan pertahanan pada era tersebut masih terpaku dalam menjaga stabilitas nasional saja, karena masih belum ada batasan yang jelas sehingga

angkatan bersenjata Indonesia memiliki sebuah keunikan dibandingkan dengan angkatan bersenjata dari negara lain (Amanah, 2014). Oleh karena itu, diplomasi pertahanan yang diterapkan selama era orde baru tidak terlalu signifikan karena dipengaruhi faktor stabilitas nasional dan era globalisasi yang belum lahir pada masa itu.

Namun semenjak adanya peristiwa reformasi dengan skala nasional di Indonesia pada tahun 1998, diikuti dengan reformasi TNI pada tahun 1999, perlahan peran militer mulai dilemahkan dalam jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Penghapusan doktrin ini mengakibatkan militer melepaskan posisi dan peran politik formalnya sesuai dengan peraturan MPR NOMOR VII/MPR/2000 TAHUN 2000 pasal 5 yang mengatur keikutsertaan TNI dalam proses penyelenggaraan negara. Walaupun militer tidak lagi menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia setelah reformasi, pengaruhnya di balik layar tetap signifikan dan tidak bisa diabaikan. Hal ini tercermin dalam fenomena banyaknya purnawirawan TNI yang terjun ke dunia politik dengan bergabung dalam partai politik sehingga kebijakan diplomasi akan sangat bergantung pada keputusan purnawirawan yang masih mengisi jabatan strategis di pemerintahan seperti pengambilan keputusan maupun “*Agenda Setting*” yang ingin diterapkan seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo Subianto, AM Hendropriyono dan lain-lain.

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, peristiwa tersebut setidaknya menghasilkan 7 hal penting yang berkaitan dengan peran dan fungsi TNI yang nantinya akan mengarah terhadap kebijakan diplomasi luar negeri. Pertama, Tap MPR No. VI/MPR/2000 yang mengatur Pemisahan TNI dan Polri. Kedua, Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menetapkan Peran TNI dan Polri. Ketiga, penghapusan hak politik dan fraksi ABRI di parlemen, dengan fraksi ABRI terakhir tercatat pada tahun 2004. Keempat, penerbitan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kelima, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Keenam, pelaksanaan rotasi Panglima TNI secara bergiliran dari masing-masing matra yang ada (Thea, 2023).

Hingga saat ini, kerjasama internasional di bidang pertahanan masih berjalan baik dengan negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral. Indonesia sebagai negara berkembang juga sering menjalin kerjasama dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat dalam hal Latihan Bersama (Latma) ataupun pembelian senjata atau alutsista / alpahtankam sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dan memperkuat lini pertahanan dari ancaman luar yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, latihan tempur bersama

negara-negara lain sering diadakan oleh TNI untuk bisa memberdayakan kekuatan militer negara Indonesia. Banyaknya latihan bersama dengan negara lain ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan kemampuan yang dibutuhkan di medan tempur dan bisa meningkatkan kualitas angkatan bersenjata Indonesia.

Jika melihat dari 20 tahun terakhir hingga saat ini, sudah ada beberapa program kerjasama atau latihan bersama setiap tahunnya yang telah dilakukan TNI dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, India, Malaysia dan negara-negara lainnya. Program latihan bersama ini diadakan di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Jakarta, Lampung, Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah lainnya. Latihan bersama tersebut dilakukan demi upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini personel TNI untuk bisa mendapatkan ilmu dan kemampuan yang memadai sekaligus mempererat hubungan diplomasi dengan negara mitra yang telah disebutkan tadi.

Dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditandai dengan adanya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat (pasca reformasi) tahun 2004, Indonesia menjalin latihan bersama dengan negara sahabat. Tepatnya tanggal 25 Oktober TNI AL mengadakan latihan bersama dengan negara Republic of Singapore Navy (RSN) dari Singapura selama 11 hari. Latihan dengan kode “Eagle 18/4” ini digelar di 3 lokasi, yaitu Changi, Laut Cina Selatan dan Surabaya. Latihan ini melibatkan 3 tahap (Tahap Awal, Tahap Manuvra dan Tahap Manuvra) dan telah melibatkan unsur-unsur TNI AL dari Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), yang mencakup KRI Nala-363, KRI Badik-623, dan KRI Dutanto-877, dengan dukungan dari KRI Pulau Rupert-712, pesawat Nomad N-22, serta tim Pasukan Katak (Satpaska) Armatim dan Satpaska Armabar. Sementara itu, unsur-unsur RSN meliputi RSS Sea Tiger, RSS Volour, RSS Dauntless, dan RSS Persistence, didukung oleh kapal penyapu ranjau RSS Bedok dan sebuah helikopter Puma. (Puspen TNI, 2004). Latihan bersama ini menandai dimulainya diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara lain yang nantinya akan dilakukan secara bertahap setiap tahun pada masa kepemimpinan SBY periode pertama.

Pada periode kedua kepemimpinan SBY, tepatnya tahun 2009, latihan bersama semakin intens dilaksanakan untuk meningkatkan *interoperability* dari TNI. Ditandai dengan adanya tiga latihan bersama dengan Amerika Serikat, Australia dengan beberapa negara sahabat lainnya sepanjang tahun 2009. Salah satunya ialah digelarnya latihan dengan nama “Garuda Shield 09” yang dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat (Batti, 2009). Latihan

bersama ini sebagai bentuk kerjasama multilateral, karena diikuti oleh 24 negara peserta dengan jumlah prajurit sekitar 1000 personel (Puspen TNI, 2009). Tujuan yang ingin dicapai melalui latihan militer antar negara meliputi solidaritas antar negara peserta dalam rangka “*Unity Effort and Effectiveness*” dalam melakukan operasi pemeliharaan perdamaian. Selain itu, hubungan yang lebih harmonis terjalin antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terlebih negara-negara yang berpartisipasi sebagai *Troop Contributor Country* (TCC) (Puspen TNI, 2009). Oleh karenanya, latihan ini dinilai dalam rangka sebagai langkah diplomasi pertahanan yang dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan, kestabilan dan kesolidan antar negara sahabat/aliansi.

Pada awal periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014, kerjasama pertahanan dengan negara lain juga dilaksanakan. Meskipun agenda pembangunan nasional pada masa kepemimpinan Joko Widodo berfokus pada pengembangan infrastruktur dalam negeri, namun yang tertuang dalam visi-misi program dengan nama “Nawacita” ini tertulis dalam poin pertama ialah “*Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara...*” (Komisi Pemilihan Umum, 2014) yang mana ini menandakan bahwa kedaulatan negara (dalam hal ini keamanan dan pertahanan) menjadi prioritas nomor satu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat itu. Kerjasama bilateral/multilateral dalam bidang pertahanan kian digencarkan masif dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada saat itu baik di aspek industri, pendidikan dan khususnya program pelatihan.

Latihan bersama pada awal periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tepat setelah pelantikannya sebagai Presiden terpilih dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014 (tepat sebulan setelah beliau dilantik). Latihan yang diikuti 97 prajurit dari kedua belah batalyon ini diberi nama Latma “Lantern Iron 15-2441” yang berlokasi di Sukabumi. Dalam penyampaian yang diberikan oleh Asops Kasal yang dibacakan Danpasmars-2 kegiatan ini merupakan bentuk latihan kolaboratif antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam teknik dan taktik operasi khusus, baik di darat maupun di laut, bagi anggota Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Korps Marinir TNI. (Puspen TNI, 2014).

Selanjutnya di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, latihan bersama juga dilaksanakan antara TNI Angkatan Udara dengan Angkatan Udara Malaysia yang bernama Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dengan nama latihan

“Elang Malindo 27/2019” pada bulan November (Media Center Riau, 2019). Mayor Jenderal Dato Muhamad Norazlan menyatakan bahwa latihan yang diadakan setiap dua tahun ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian kedua angkatan udara, terutama dalam melaksanakan operasi udara untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Puspen TNI, 2019). Latihan bersama ini dapat dibilang menjadi pasak dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Malaysia sebagai negara tetangga yang pada beberapa kesempatan sering terjadi konflik khususnya di area perbatasan kedua negara.

Lebih lanjut, program Diplomasi Pertahanan terkait kerjasama internasional bilateral/multilateral tertuang dalam Buku Putih dari Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2015. Pembangunan dalam konteks kerja sama internasional bertujuan untuk memperkuat hubungan pertahanan baik bilateral maupun multilateral, sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, serta memperkuat identitas negara kita sebagai negara maritim dan kepulauan. Bentuk kerja sama internasional ini meliputi upaya dalam membangun kepercayaan (Confidence Building Measures/CBM), pengembangan kapasitas (Capacity Building), pencapaian perdamaian global, pendidikan, diskusi mengenai sistem keamanan dan pertahanan strategis, pelatihan, serta proyek kemitraan strategis nasional sesuai kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pertahanan, 2015). Arah kebijakan pertahanan ini menitikberatkan kepada diplomasi Indonesia yang tidak lepas dari politik bebas-aktif yang dianut sejak dahulu kala oleh pemerintah Indonesia, dimana upaya diplomasi Indonesia tidak mengedepankan aliansi melainkan kemitraan strategis yang tidak mengikat suatu negara dengan negara lainnya yang juga dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama bilateral atau multilateral pada bidang-bidang tertentu, termasuk salah satunya ialah bidang keamanan-pertahanan dan menjadi instrumen diplomasi yang lebih fleksibel dan tidak mengikat (Montratama & Yani, 2017, p. 56). Hal ini lah yang mengedepankan asas politik bebas-aktif Indonesia sebagai pakem arah kebijakan luar negeri yang dianut hingga saat ini.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan dengan negara-negara mitra yang menitikberatkan pada latihan bersama atas dasar kepentingan nasional dalam membangun *capacity building* demi menjaga keutuhan dan kedaulatan nasional. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji pola kerjasama militer Indonesia dengan negara lain dalam *Joint Exercise Military* (Latihan Militer Gabungan) dari tahun 2004 – 2024 dimana dalam rentang tahun tersebut terdapat 2 periode kepemimpinan Kepala Negara yang berbeda yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki latar belakang militer dan

Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang pengusaha. Sehingga analisa yang akan diuraikan nanti akan berfokus pada *Foreign Policy Analysis* yang terbagi menjadi 2 yaitu Kondisi Lingkungan Strategis dan Politik Domestik.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menawarkan kebaruan data latihan bersama/latihan gabungan antara negara-negara yang terkait. Lalu bagaimana TNI sebagai sebuah institusi bisa menjadi aktor Diplomasi Pertahanan Indonesia di kancah internasional menggunakan sumber daya yang dimiliki.

1.2. Penelitian Terdahulu

Jurnal: Rifqa D. Amanah. 2014. "Politics Military In Post-New Order Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 1, No 1.

Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan institusi militer dalam transisi pemerintahan. Sedangkan penelitian saya akan membahas pola diplomasi pertahanan melalui institusi militer (TNI) pasca reformasi dari 2004-2024. Kesamaan dari dua penelitian ini akan cenderung membahas tentang perubahan pola kebijakan diplomasi pertahanan pada periode tahun 2004-2024.

Persamaan penelitian terletak pada melihat bagaimana institusi militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pola latihan bersama di setiap periode presiden yang menjabat pasca reformasi. Penelitian ini memfokuskan pengamatan perubahan pola dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sejak era kepemimpinan SBY hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Jurnal: Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas. 2014. "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 4, No. 2.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Diplomasi Total yang dijalankan Indonesia kurang optimal dikarenakan komponen utama yang belum lengkap dalam mengemban kepentingan nasional. Sedangkan penelitian saya akan membahas bagaimana komponen utama yaitu TNI dapat mengoptimalkan kepentingan nasional dengan meningkatkan kemampuan melalui latihan bersama dengan negara lain.

Persamaan penelitian ini terletak pada bagaimana TNI sebagai komponen utama harus bisa mengoptimalkan seluruh komponen yang tersedia dalam rangka meningkatkan kemampuan institusi militer Indonesia dan dapat menjadi daya tawar yang kuat di kawasan regional atau internasional melalui diplomasi pertahanan yang terjadi semenjak pasca reformasi hingga saat ini (2004-2024).

Jurnal: Syaiful Anwar. 2014. “Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan”. Jurnal Pertahanan. Vol 4, No 2

Penelitian ini membahas tentang adanya tantangan dari dunia diplomasi pertahanan yang kerap muncul dalam permasalahan kawasan khususnya dengan negara tetangga mengenai masalah perbatasan, maritim, pembajakan di area laut dan rivalitas antar negara kawasan. Sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai bagaimana pola dan mekanisme diplomasi pertahanan dapat menjadi solusi untuk bisa meningkatkan keamanan teritorial khususnya di bidang pertahanan negara dengan mewujudkan kemampuan personel TNI melalui latihan gabungan..

Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana peran sentral diplomasi pertahanan dalam meningkatkan daya saing di kancah global dengan pendekatan pola yang ditandai dengan hadirnya kerjasama antar negara untuk bisa meningkatkan kekuatan antar negara melalui latihan bersama, pertukaran informasi dan kebijakan diplomasi yang terstruktur dalam kompetensi dunia pertahanan.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Dalam menjelaskan lebih rinci terkait fokus masalah yang akan dibahas, maka pertanyaan riset untuk penelitian kali ini adalah:

“Seperti apakah pola kerjasama militer Indonesia dalam bentuk latihan militer gabungan dengan negara lain tahun 2004-2024?”

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui institusi militer antara Indonesia dengan negara lain melalui latihan bersama/latihan gabungan yang terjalin selama 20 tahun dan dibawah kepemimpinan 2 Presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis:
 - Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap kajian ilmu politik dan hubungan internasional.
 - Dapat memberi kontribusi terhadap kajian studi terkait diplomasi.
 - Dapat menjadi acuan ataupun pembanding terhadap studi terkait, yang ada atau yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis:
 - Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan pembelajaran, rujukan bagi masyarakat umum dan akademik.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terdiri atas beberapa bab dan sub-bab. Berikut adalah sistematika pembahasan dari penelitian ini :

a. BAB I : Pendahuluan

Bab pertama akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

b. BAB II : Kerangka Teori

Bab kedua akan menjelaskan kajian teori dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian serta untuk menganalisis penelitian ini.

c. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian – diikuti dengan penjelasan dari jenis penelitian serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan, dan alasan mengapa metode tersebut dipilih dalam penelitian ini.

d. BAB IV : Pembahasan dan Analisis

Bab keempat akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian – primer maupun sekunder. Data kemudian diolah dan disajikan sebagai pembahasan dan analisa, sehingga pertanyaan penelitian yang dijelaskan di bab pertama.

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dianalisis dan dibahas. Saran akan diberikan dari hasil penelitian untuk topik penelitian terkait.

BAB II

2.1.Liberalisme

Secara umum, Liberalisme dapat diartikan sebagai sebuah ideologi yang doktrin politik yang bisa mewujudkan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu dalam kaitannya dengan masalah politik di dalam sistem masyarakat (Minogue, Girvetz, Dagger, & Ball, 2024). Liberalisme adalah sebuah doktrin. universal yang berkomitmen pada komunitas manusia secara universal yang melampaui identitas dan keanggotaan dalam suatu komunitas dari negara atau bangsa, selain itu pandangan dari liberalis mengenai interdependensi menunjukkan bahwa di dunia saat ini, perbatasan antar negara semakin terbuka dan mudah untuk dilintasi (Dugis, 2016, p. 64).

Filsuf asal Jerman Immanuel Kant menjabarkannya liberalisme dengan lebih lanjut. Pertama, berdasarkan basis resiprokal, negara-negara dapat membangun organisasi serta aturan-aturannya agar kerja sama yang dibangun dapat menjadi lebih mudah (Kant & Beck, 1957, p. 127). Kedua, dalam liberalisme, kerja sama yang di dalamnya mempromosikan perdamaian, anggapan bahwa suatu kerja sama dapat meningkatkan aspek kesejahteraan sambil mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam jangka panjang karena pemerintah di suatu negara pasti tidak mau mengganggu proses peningkatan kesejahteraan mereka (Ward, Siverson, & Cao, 2007, pp. 584-585). Terlebih lagi, jika kerja sama antar negara yang terjalin semakin meningkat intensitasnya, mereka akan sadar bahwa mereka akan bergantung satu sama lain (Interpedensi) (Keohane & Nye, 2001, p. 185).

Tokoh liberalis lainnya, John Locke, telah menggunakan teorinya tentang *Natural Rights* atau hak-hak alamiah untuk berargumen bahwa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, mempunyai kekuasaan terbatas atas masyarakat serta dapat digulingkan oleh masyarakat dalam kondisi tertentu dimana dalam konteks ini pemerintahan bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu instrumen pemerintahan yang diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan bermasyarakat (Dugis, 2016, p. 58).

Dalam perspektif lainnya tepatnya pasca perang dunia pertama, dibawah kepemimpinan Presiden Amerika Woodrow Wilson, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada saat itu bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) berhasil dibentuk, menunjukkan penerapan konsep kolektif. keamanan, yang merupakan salah satu pedoman yang mungkin untuk mencegah terulangnya perang dan menciptakan perdamaian dunia (Dugis, 2016, pp. 55-56).

Selanjutnya pada tahun 1991, tokoh politik dari Amerika Serikat yaitu Samuel P. Huntington dengan karyanya yang berjudul “*The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*” memiliki argumen bahwa dunia sedang memasuki gelombang ketiga menuju demokratisasi pada tahun tersebut, dimana menurut Huntington, dunia sudah terbebas dari legitimasi rezim otoriter yang berkuasa dan munculnya negara-negara “donor” yang melakukan demokratisasi di negara lain dalam hal menghidupkan demokrasi dengan bantuan pembangunan, kerjasama, dan efek bola salju dari proses demokratisasi di negara tersebut (Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, 1993, p. 21).

Dalam buku “*International Relations Theory for the Twenty-First Century An Introduction*” John MacMillan mengatakan penganut pandangan liberalisme, sejak terjadinya Perang Dunia I, telah terbukti adanya kritik terhadap sistem hubungan internasional yang ada pada waktu itu, yang mendorong upaya pembentukan perdamaian melalui beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut mencakup diplomasi terbuka, hak menentukan nasib sendiri, pasar bebas, penyelesaian sengketa secara damai, pelucutan senjata, serta pembentukan organisasi keamanan internasional dalam bentuk *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (Griffiths, 2007, p. 21).

Agar terwujudnya perdamaian tersebut melalui metode-metode yang barusan sudah dijelaskan, negara-negara didorong untuk melakukan kerja sama antara satu sama lain. Lambat laun dari kerja sama yang terjalin antar negara tersebut akan muncul interdependensi (ketergantungan) antara satu sama lain dari negara-negara tersebut. Interdependensi ini terjadi karena penekanannya pada kerja sama yang terjalin melalui prosedur atau satuan hukum yang terbentuk dalam suatu kerja sama tersebut. Seluruh entitas politik di dunia pun memandang kekuasaan sebagai suatu nilai dan sumber daya yang berkembang, di mana semua pihak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh manfaatnya (Buzan & Waever, 1998). Hal tersebut pun menjadi fenomena pada saat itu, di mana derasnya arus liberalisasi dan globalisasi mendorong masifnya penganutan atas tradisi liberalisme di aspek-aspek politik, ekonomi dan budaya (Ikenberry, 2009, p. 217).

Maka dari itu, perspektif liberalisme akan menjadi teori yang relevan dalam untuk membahas penelitian kali ini mengenai diplomasi dengan negara lain khususnya dalam bidang pertahanan. Kerjasama yang terjalin antar negara ini bertujuan untuk bisa melakukan sebuah pertukaran nilai yang akan sangat menguntungkan bagi negara negara yang terlibat. Melalui diplomasi dalam bidang pertahanan ini, kerjasama pertahanan Indonesia dengan

negara lain melalui latihan bersama dapat dimaksimalkan untuk menunjang keamanan masyarakat negara khususnya masyarakat Indonesia. Liberalisme menekankan adanya perdamaian serta kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Aktor yang terlibat pun, tidak hanya melibatkan negara, aktor non-negara; organisasi internasional juga turut terlibat. Keduanya (negara dan organisasi internasional) dapat bekerja sama satu sama lain, agar tercapainya kepentingan bersama. Liberalisme menjadi sebuah perspektif yang relevan di era globalisasi ini yang menekankan kerjasama antar negara.

2.2Diplomasi Pertahanan dan Latihan Militer Gabungan

Diplomasi Pertahanan adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional dimana dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan, komunikasi dan negosiasi adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan diplomasi. Dengan komunikasi yang efektif, diplomat dapat lebih mudah memenuhi kepentingan negara mereka, karena setiap upaya diplomasi memerlukan proses komunikasi yang baik tentu memerlukan keterampilan sosial dan komunikasi interpersonal (Soengeng, 2020, p. 26).

Menurut Sudarsono, Diplomasi Pertahanan adalah keterampilan dalam menentukan bagaimana mencapai kepentingannya tanpa kekerasan dan permusuhan. Diplomasi Pertahanan dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perwakilan dari kementerian pertahanan atau lembaga pemerintah terkait, dengan tujuan untuk mengadvokasi kepentingan nasional dalam domain keamanan dan pertahanan. Fokus utama dari diplomasi ini adalah pada pemanfaatan negosiasi dan proses diplomatik itu sendiri (Sudarsono, Mahroza, & Surryanto, 2018, p. 70).

Menurut Halkis, Diplomasi Pertahanan sering kali sulit untuk dipisahkan antara praktik dan teori, karena studi tentang diplomasi pertahanan merupakan gabungan dari berbagai pendekatan diplomasi yang diterapkan dalam konteks pertahanan negara. (Soengeng, 2020, p. 32). Diplomasi pertahanan Indonesia adalah pendekatan dan strategi kerjasama yang melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan diplomasi untuk membangun hubungan persahabatan antara negara-negara, memfasilitasi kerjasama, dan, yang paling penting, meningkatkan tingkat kepercayaan (CBM).

Seiring berjalannya waktu, diplomasi pertahanan sering dikaitkan dengan instrumen politik atau kekuasaan politik (*Power Politic*). Diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan dalam maknanya, karena konsep ini tidak lagi terbatas pada aspek-aspek yang umumnya dikuasai oleh segelintir aktor internasional dengan kemampuan dominan. seperti

negara adidaya layaknya Amerika Serikat, Cina atau Rusia, melainkan dimulai dari aspek terkait stabilitas keamanan internasional (Pedrason & Styoko, *Legal Politics of Indonesia's Military Position Through Policy Diplomacy and Agreement in the ASEAN Region*, 2023, p. 181).

Dalam Diplomasi Pertahanan terdapat ruang lingkup yang mencakup karakteristik. Ada tiga karakteristik utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman konsep diplomasi pertahanan, yaitu *Confidence Building Measures (CBMs)*, *Foreign Policy Objectives in the Other Countries Area of Defense* dan *Civil-Military Relation* (Soengeng, 2020, p. 32). Pedrason menjelaskan bahwa memahami persepsi satu sama lain dapat mencegah potensi konflik. Membangun kepercayaan (*Trust*) terlihat pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan CBM, khususnya dalam konteks pembangunan perdamaian, meskipun konsep CBM lebih sering dibicarakan pada saat konflik (Pedrason, *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*, 2015, p. 116).

Istilah lain yang perlu didefinisikan adalah konsep mengenai *Joint* (Gabungan). Dalam konteks militer kontemporer, "Gabungan" didefinisikan sebagai aktivitas, operasi, dan organisasi yang melibatkan elemen dari sedikitnya dua angkatan dari masing-masing pihak yang berpartisipasi (NATO, 2001, p. 107). Kata kunci dalam definisi ini adalah angkatan bersenjata, yang merujuk pada Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan korps marinir. Oleh karena itu, definisi ini menentukan bahwa kebersamaan bersifat kelembagaan, yang didasarkan pada kerja sama antara angkatan bersenjata terlepas dari apakah aktivitas mereka berlangsung dalam satu domain atau di banyak domain (Jackson, 2018, p. 3). Dengan demikian, istilah *Joint Military Activities* (Aktivitas Militer Gabungan) merujuk pada berbagai macam kegiatan di mana lebih dari satu angkatan terlibat, dimana kegiatan ini mencakup kampanye dan operasi militer gabungan, baik dalam kondisi perang maupun damai yang meliputi pembentukan dan pemeliharaan struktur organisasi militer gabungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kursus pendidikan militer dan pelatihan militer profesional gabungan (Jackson, 2018, p. 3).

Salah satu elemen utama diplomasi pertahanan adalah kerjasama bilateral dan multilateral, yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan kerjasama tingkat tinggi antara perwakilan sipil dan militer dari berbagai negara. Ini termasuk Latihan Militer Bersama, studi banding intelijen dan partisipasi dalam organisasi keamanan internasional (Drab, 2018). Program pendidikan dan pelatihan militer untuk personel militer juga sangat penting, karena

membangun kepercayaan dan mendorong kerjasama antara angkatan bersenjata seperti mengadakan latihan militer bersama dengan negara lain meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kemitraan militer (Drab, 2018).

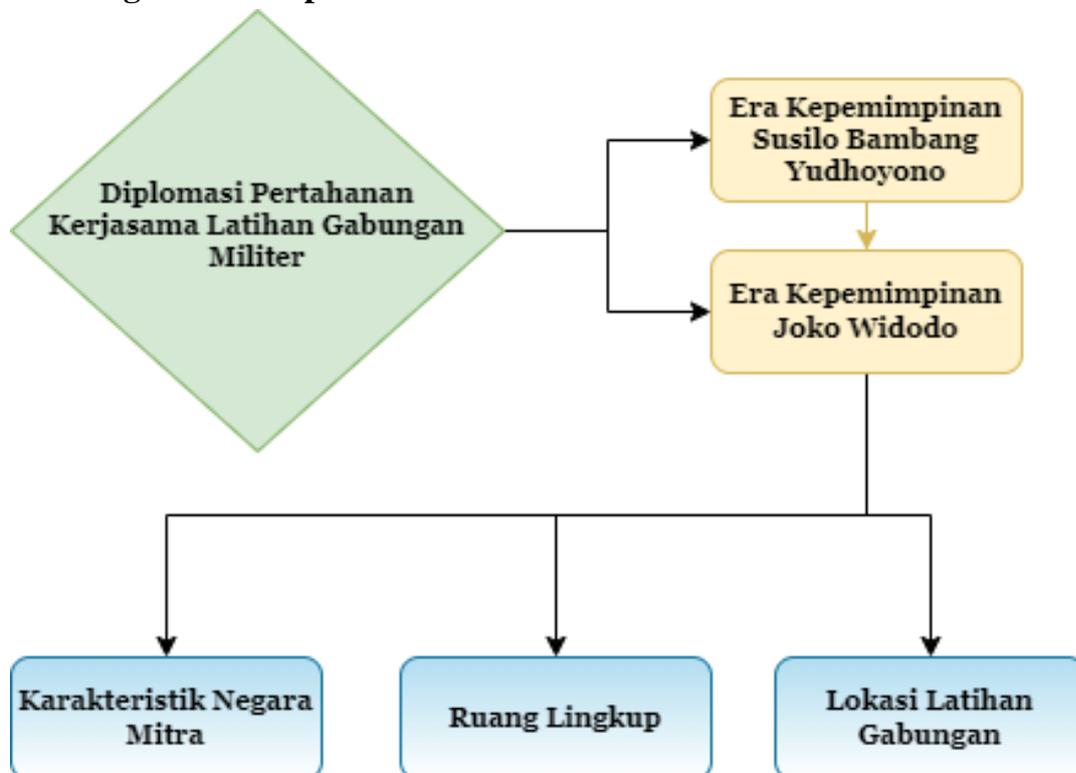
Di antara kegiatan diplomasi pertahanan, latihan bersama telah diidentifikasi sebagai salah satu aktivitas yang paling penting, karena dapat berkontribusi dalam mendukung kerja sama pertahanan antara negara dan bangsa. Selain itu, latihan bersama berguna dalam meningkatkan interoperabilitas dengan militer asing serta meningkatkan tingkat kepercayaan dan rasa hormat antara negara-negara yang berpartisipasi (Inkiriwang, 2021, p. 420). Di antara berbagai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia, latihan bersama menjadi yang paling dominan dan signifikan. Dalam konteks diplomasi pertahanan Indonesia, latihan bersama dianggap dapat membantu mengatasi masalah keamanan nasional serta memfasilitasi langkah-langkah untuk membangun kepercayaan (Inkiriwang, 2021). Selain itu tujuan diplomasi pertahanan lainnya untuk menjalin kerja sama dengan institusi pertahanan negara mitra dalam berbagai operasi, baik yang bersifat militer maupun non-militer, seperti bantuan bencana dan evakuasi medis (Inkiriwang, 2021, p. 422). Hubungan yang dibangun selama latihan ini dianggap krusial untuk langkah-langkah pembangunan kepercayaan (CBMs) dan bermanfaat untuk memupuk semangat persahabatan di antara para peserta dalam kerjasama multilateral (USINDOPACOM, 2018).

Diplomasi pertahanan berfungsi sebagai alat penting untuk membina hubungan internasional dan mempromosikan stabilitas regional. Tujuan utama dari diplomasi pertahanan mencakup beberapa aspek penting, yaitu mendukung pencapaian tujuan diplomatik nasional secara keseluruhan, mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai angkatan bersenjata serta situasi keamanan, memfasilitasi kerjasama dan komunikasi antara angkatan bersenjata, mengelola dan memelihara hubungan pertahanan resmi, mendukung ekspor senjata dan peralatan militer, serta mewakili negara dan angkatan bersenjata dalam upacara resmi dan acara seremonial lainnya (Muniruzzaman, 2020, p. 74). Diplomasi pertahanan adalah alat multifaset yang melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik, mempromosikan stabilitas regional dan menangani tantangan keamanan yang menjadikan mekanisme strategis yang mengintegrasikan pemikiran strategis negara lain serta menjadikannya alat geopolitik yang dinilai efektif dan dinamis di kawasan global (Muniruzzaman, 2020). Pakar dalam hubungan internasional, Kenneth Waltz juga menyatakan bahwa aliansi dibuat oleh negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama (Waltz, *Theory of International Politics*, 1979, p. 166).

Seperti yang dikatakan Waltz, dalam sistem politik internasional yang anarki, “keuntungan relatif lebih penting daripada keuntungan absolut” (Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, 2001).

Ini menandakan bahwa, masing-masing dari tiap negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan negara lainnya, akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada negara lainnya. Pada akhirnya, keuntungan yang didapat oleh masing-masing negara yang bekerjasama akan dinilai tidak sama atau relative jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Karena bagaimanapun, negara setidaknya diasumsikan ingin memastikan kelangsungan hidupnya sendiri karena ini merupakan prasyarat untuk mengejar tujuan daripada kepentingan nasional. Kekuatan pendorong untuk bertahan hidup ini adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku mereka dan pada gilirannya memastikan negara-negara mengembangkan kemampuan militer ofensif dari intervensi asing dan sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan relatif mereka (khususnya militer) baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan negara lain.

2.3. Diagram Konseptual



BAB III

3.1. Metode Penelitian

Menurut Rajendra Kumar, penelitian merupakan upaya yang mendalam dan terfokus untuk memperoleh pengetahuan serta pemahaman tentang fenomena sosial dan fisik. (Rajendra, 2008, p. 1). Penelitian juga dapat dipandang sebagai aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai hal, seperti teori, fakta, prinsip, atau penerapan dari fakta, prinsip, dan teori tersebut. (Rajendra, 2008). John Best mengatakan bahwa penelitian adalah analisis yang objektif dan sistematis, serta observasi yang terkontrol yang dapat mendasari pengembangan generalisasi, prinsip atau teori yang dapat menghasilkan suatu prediksi (Rajendra, 2008, p. 2). Selain itu, penelitian menurut Tyrus Hillway adalah studi yang dilakukan oleh seseorang melibatkan penyelidikan yang teliti dan menyeluruh terhadap suatu masalah tertentu, dengan tujuan agar solusi terhadap masalah tersebut dapat ditemukan (Hillway, 1956, p. 284).

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan prosedur ilmiah (Bakry, 2007, p. 7). Dilakukannya penelitian juga adalah untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu, atau yang berhubungan dengan sesuatu yang lain (Bakry, 2007, p. 7). Dan juga, penelitian digunakan untuk menguji sebuah hipotesis dari suatu hubungan kausal antar-variabel (Bakry, 2007, p. 8).

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa penelitian merupakan penyelidikan yang sifatnya sistematis dengan mencatat fakta-fakta terhadap objek atau bidang pengetahuan tertentu (Bakry, 2007, p. 7). Penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan mendapatkan fakta serta menemukan prinsip agar diperolehnya pengetahuan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan suatu masalah (Bakry, 2007, p. 7). Penelitian juga berfungsi sebagai sumbangan otentik terhadap suatu bidang ilmu, dengan harapan dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan tersebut (Bakry, 2007, p. 7).

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian yang mewakili sejumlah alat dan instrumen yang digunakan dan memberikan cara untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis informasi yang ditemukan sehingga dapat ditemukan kesimpulannya (Walliman, 2017, p. 7).

Berkenaan dengan berbagai metode penelitian, berdasarkan jenis penelitian, tujuan, sifat, dan pendekatannya, terdapat empat kategori metode penelitian.:

1. Metode eksperimen adalah pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas variabel-variabel eksperimen. Dalam proses evaluasi ini, penggunaan variabel kontrol menjadi krusial untuk menentukan efektivitas variabel yang diuji. Metode eksperimen umumnya digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara rigoris dan sering diterapkan dalam disiplin ilmu eksakta.
2. Metode verifikasi adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau sesuai dengan harapan atau teori yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji teori-teori yang ada, mengembangkan teori baru, serta menciptakan pengetahuan baru.
3. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur, karakteristik, dan atribut dari suatu fenomena. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data, diikuti oleh analisis dan interpretasi data tersebut. Dalam praktiknya, metode deskriptif dapat diterapkan melalui berbagai teknik, termasuk survei, studi kasus, studi komparatif, analisis gerak dan waktu, analisis perilaku, serta analisis dokumenter.
4. Metode historis adalah pendekatan penelitian yang fokus pada studi peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dalam penerapannya, metode ini dapat melibatkan studi komparatif-historis, yuridis, dan bibliografi. Tujuan dari metode historis adalah untuk mengidentifikasi generalisasi dan merekonstruksi masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, membuktikan, serta mensintesis bukti-bukti guna menetapkan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang solid (Suryana, 2010, p. 14).

Dari keempat macam metode tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan mencari unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat dari isu penelitian yang akan diteliti, dimulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu dianalisis dan diinterpretasikan. Melalui metode deskriptif, tentu linear dengan pertanyaan penelitian “*Seperti apakah pola kerjasama militer Indonesia dengan negara lain tahun 2004-2024?*” dapat terjawab dengan menjelaskan fenomena terkait diplomasi pertahanan Indonesia, didukung dengan unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat yang diperoleh melalui studi kasus.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang bersifat intuitif dan sistematis, dirancang untuk membantu peneliti dalam menghasilkan pengetahuan secara efisien dan koheren (Bakry, 2007, p. 62). Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses sosial (Bakry, 2007, p. 62). Dalam metode ini data bersifat tertulis termasuk kutipan atau deskripsi mengenai peristiwa tertentu (Bakry, 2007, p. 111). Jika ada informasi yang bersifat numerik, itu hanya merupakan pendukung terhadap bukti tekstual (Bakry, 2007, p. 111).

Metode penelitian kualitatif memberikan data yang bermakna, menerjemahkan data, atau membuat suatu data menjadi lebih dimengerti (Bakry, 2007, p. 111). Secara umum, penerjemahan atau interpretasi data kualitatif dilaksanakan dalam tiga tingkat. Pertama, pada *interpretasi pertama*, yakni interpretasi dari sudut pandang dari orang-orang yang sedang diteliti (Bakry, 2007, p. 111). Kedua, *interpretasi kedua*, yakni interpretasi kualitatif dari sudut pandang peneliti yang melakukan suatu penelitian (Bakry, 2007, p. 111). Ketiga, *interpretasi ketiga*, yakni interpretasi kualitatif yang dibuat oleh pembaca laporan penelitian (Bakry, 2007, p. 111).

Berdasarkan jenisnya, terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif, yakni; pertama, metode naratif atau *narrative* yaitu mengeksplorasi kehidupan dari seorang individu atau kelompok (Creswell & Clark, 2012). Kedua, fenomenologi atau *phenomenology* yaitu memahami intisari pengalaman dari suatu fenomena (Creswell & Clark, 2012). Ketiga, teori dasar atau *grounded theory* yaitu mengembangkan teori yang berdasar dari data lapangan (Creswell & Clark, 2012). Keempat, etnografi atau *ethnography* yaitu menggambarkan dan menginterpretasi suatu kelompok budaya atau sosial (Creswell & Clark, 2012). Kelima, studi kasus atau *case study* yaitu mengembangkan analisis mendalam dari satu kasus atau beberapa kasus dengan menggunakan sumber-sumber dari dokumen yang bersifat historis dan analisis, dengan beberapa sumber dari dokumen-dokumen resmi, wawancara, observasi, dst (Creswell & Clark, 2012).

Dari kelima jenis metode yang dijelaskan di atas, penelitian menggunakan jenis metode Teori Dasar (*Grounded Theory*). Digunakannya metode Teori Dasar dikarenakan dalam penelitian ini membahas tentang teori Liberalisme yang mengedepankan tentang bagaimana sebuah negara dapat meningkatkan kekuatan untuk meraih kepentingan nasional mereka. Melalui metode Teori Dasar ini, pemahaman terkait bagaimana Indonesia melakukan

diplomasi pertahanan dengan pendekatan liberalisme yaitu melalui kerjasama dengan negara-negara lain dimana keuntungan yang didapat akan menjadi sebuah potensi Indonesia dalam meraih kekuatan militer yang diinginkan. Diplomasi Indonesia dalam bidang pertahanan ini akan menjadi isu utama yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan, aktor yang terlibat serta melihat pola yang terjadi antara kerjasama yang terjalin selama 20 tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif, pengaruh diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain dapat dianalisis secara mendalam dan mengakar.
- b. Penggunaan metode penelitian kualitatif juga berkaitan dengan rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian, *“Seperti apakah pola kerjasama militer Indonesia dalam bentuk latihan militer gabungan dengan negara lain tahun 2004-2024?”* akan lebih mudah dijelaskan menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan memberikan analisa komprehensif dari fenomena yang ada.
- c. Penelitian ini akan mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur, karakteristik, dan atribut dari fenomena yang diteliti. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri dengan interpretasi data tersebut.
- d. Penelitian ini juga akan menggunakan jenis metode Teori Dasar dengan mengembangkan analisis mendalam dari isu ini dikarenakan dalam penelitian ini membahas tentang teori liberalisme yang mengedepankan tentang bagaimana sebuah negara dapat meningkatkan kekuatan untuk meraih kepentingan nasional mereka dari sumber-sumber dokumen yang historis dan analitis.
- e. Penelitian ini akan menggunakan buku, jurnal, artikel, berita serta wawancara sebagai referensi pendukung. Juga, dalam prosesnya, akan dilakukan studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya (sebagai parameter), dalam proses pembaruan isu melalui penelitian ini.

3.2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yaitu dengan pendekatan intuitif dan sistematis yang memberikan data yang bermakna,

menerjemahkan data, atau membuat suatu data menjadi lebih dimengerti (Bakry, 2007, p. 62 & 111).

Data-data kualitatif yang digunakan adalah:

- a. Data primer: Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013, p. 194). Data-data primer di antaranya: dokumen resmi negara; Dokumen resmi Kementerian Pertahanan Indonesia melalui Perpustakaan Kementerian Pertahanan dan situs resmi dari Tentara Nasional Indonesia (<https://tni.mil.id/>).
- b. Data sekunder: Sumber yang tidak langsung menyampaikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara seperti individu lain atau dokumen. (Sugiyono, 2013, p. 194). Data-data sekunder di antaranya: buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media elektronik.

Proses pengolahan data serta analisis dalam penelitian ini terbagi dalam empat proses:

1. Pengumpulan Data, dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dari dokumen-dokumen yang disajikan secara deskriptif,
2. Reduksi Data, pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan serta mengubah data-data yang sudah dikumpulkan, agar hasil penelitian ini relevan dan terverifikasi,
3. Penyajian Data, dalam bentuk tulisan dan,
4. Kesimpulan (Miles & Huberman, 1994, pp. 10-11)

3.3.Triangulasi Data

Uji Validitas dan Reliabilitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah dan untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ilmiah, peneliti menerapkan teknik triangulasi untuk menguji validitas data. Teknik triangulasi melibatkan pemeriksaan data dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2013, p. 240). Penggunaan triangulasi ini dilakukan untuk memperkuat analisa dengan menggunakan data yang diperoleh dari bermacam sumber dan dengan cara *Primary Resources* atau *Secondary Resources*. Jenis triangulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ilmiah ini adalah teknik dimana data dikumpulkan secara terpisah dari sumber yang sama. Peneliti akan memanfaatkan pengamatan partisipatif dan analisis dokumen dari sumber yang terbukti valid dan reliabel.

3.4. Tabel Operasional Konsep

Konsep	Bukti empirik yang diharapkan	Sumber data
Pola Kerjasama Latihan Gabungan Militer.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="644 365 962 539">1. Adanya temuan pola karakteristik negara mitra (bilateral, regional/kawasan, multilateral).<li data-bbox="644 551 962 725">2. Adanya temuan pola Ruang lingkup (matra yang terlibat, jumlah personil terlibat)<li data-bbox="644 736 962 808">3. Adanya temuan pola Lokasi latihan	Dokumen resmi, Buku, Jurnal Ilmiah, Media Cetak dan Media Elektronik